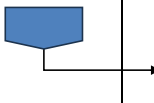
KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK DAN KERJA SAMA**	**Nomor SOP**	**SEK-OT.02.02-205**
	Tanggal Pembuatan	**20 AGUSTUS 2025**
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	**3 NOVEMBER 2025**
	Disahkan oleh	**SEKRETARIS JENDERAL**  **NICO AFINTA**
	Nama SOP	**Monitoring dan Evaluasi Permasalahan Hukum**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 2 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).	1 Memiliki pendidikan Ilmu Hukum dan memiliki kemampuan membuat analisis hukum/ konsep telaah/ Legal Drafting 2 Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan antar manusia dan mampu membangun interaksi dengan orang lain; 3 Mengetahui metode dalam melakukan pemetaan masalah, observasi, pengumpulan bahan data dan keterangan serta informasi yang dibutuhkan; 4 Mengetahui mekanisme dalam penyusunan Laporan
Keterkaitan :	**Peralatan/perlengkapan :**
1 SOP Permohonan Layanan Advokasi Hukum	1 komputer 2 akses internet 3 printer 4 ATK 5 Voice Recorder 6 Peraturan Perundang-Undangan
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
1 Jika SOP tidak dilaksanakan kegiatan SOP tidak berjalan	1 SOP ini dicatat secara tertulis dan elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PERMASALAHAN HUKUM

No	Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Karo Hukerma	Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan, Mendisposisikan Dasar Pengaduan permasalahan Hukum untuk dilakukan monitoring dan evaluasi permasalahan hukum	MULAI				Surat Dasar Pengaduan/Permohonan/ Perintah/Disposisi Permasalahan hukum yang diajukan	10 menit	Disposisi	
2	Menerima Perintah, Disposisi terkait Permasalahan Hukum dengan mempelajari serta memberikan arahan telaah permasalahan hukum agar difasilitasi dan ditindaklanjuti					Surat Dasar Pengaduan/Permohonan/ Perintah/Disposisi Permasalahan hukum yang diajukan	10 menit	Disposisi	
3	Menerima dan menindaklanjuti Perintah dan disposisi dengan memfasilitasi pengumpulan bahan data dan keterangan dalam rangka kelengkapan informasi untuk Monitoring dan Evaluasi Permasalahan Hukum					Bahan Laporan	1 Hari	Bahan Laporan dan Pengaduan/Permohonan/ Perintah/ Disposisi	
4	Menerima dan menindaklanjuti Informasi yang diperoleh untuk dilakukan analisis hukum dan konsep telaah					Bahan Laporan dan Konsep Laporan	1 Hari	Konsep Laporan dan Pengaduan/Permohonan/ Perintah/ Disposisi	JF Analis Hukum
5	Draft analisis dan telaah yang dihasilkan akan melalui proses koreksi dan dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan monitoring dan evaluasi Permasalahan Hukum			Tidak		Bahan Laporan dan Konsep Laporan	2 jam	Koreksi hasil telaah	
6	Menerima hasil analisis dan telaah, mengkoreksi menyetujui dan memberikan arahan lebih lanjut. memfasilitasi Monitoring dan evaluasi Permasalahan Hukum		Tidak	Ya		Bahan Laporan dan Konsep Hasil Telaah	2 Jam	Konsep telaah dan Pengaduan/Permohonan/ Perintah/ Disposisi	
7	Menerima laporan analisis dan telaah dan memberikan arahan lebih lanjut untuk disetujui dan ditandatangani. Hasil Monitoring dan Evaluasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku maka perlu di tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi		Tidak	Ya	belum sesuai	Konsep telaah dan Disposisi	1 Jam	Laporan/ Telaah	
8	Menindaklanjuti hasil Monitoring apakah telah sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku terkait Permasalahan Hukum yang ditangani, jika belum sesuai maka perlu evaluasi /tindaklanjut mencari kendala dan solusi. hasil final monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Pimpinan		Ya	Sesuai		Bahan laporan dan Hasil laporan Monev	10 menit	Disposisi	Melakukan evaluasi tehadap kendala/hambatan dan solusi (waktu yang dibutuhkan tentatif) tergantung dari permasalahan hukum yang terjadi, dan melaporkan kembali hasil final kepada Ka.Biro

No	Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Karo Hukerma	Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama	Ketua Tim	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Menyerahkan Laporan final pelaksanaan Monitoring dan evaluasi permasalahan hukum untuk didokumentasikan dan menjadi hasil bukti kerja					Laporan Monev	10 menit	Disposisi	
10	Dokumentasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Permasalahan Hukum					Laporan Monev	10 menit	Laporan Bukti dan Dokumentasi	
	TOTAL WAKTU					3 Hari kerja			